



## Butuh Dukungan Pemerintah Buat Bertahan

# Nasib 3.000 PKL Malioboro di Ujung Tanduk

**YOGYA (KR)** - Nasib setidaknya 3.000-an Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bergantung hidupnya di Kawasan Malioboro sudah berada di ujung tanduk memprihatinkan akibat pandemi Covid-19 dan diperparah dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Untuk itu, PKL sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari pemerintah untuk bertahan hidup sekaligus stimulus permodalan agar mampu membangkitkan kembali usahanya yang sudah tidak beroperasi sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat di DIY.

Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro Sujarwo Putra mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan memberi kelonggaran bagi PKL untuk kembali berjualan setelah 25 Juli 2021. Termasuk komitmen Pemerintah Pusat untuk sedikit meringankan beban PKL dengan Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang akan dilakukan secara bertahap dan dievaluasi agar aktivitas PKL kembali berjalan normal. BLT ini diminta agar dapat segera direalisasikan dan disalurkan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan keresahan nantinya.

"Kami meminta kepada seluruh PKL di Kawasan Malioboro agar bersabar dan bersikap tenang, sembari memantau langkah-langkah cepat dan tepat yang diambil Pemda DIY maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Kami mengingatkan jika kembali diijinkan beraktivitas agar benar-benar bahu membahu dengan aparat terkait untuk menjaga dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara optimal," tuturnya di Yogyakarta, Kamis (22/7).

Sujarwo menyampaikan berharap Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta merespons dengan cepat dan tepat, agar kebijakan pusat dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan sesuai kondisi lokalitas Yogyakarta, termasuk Malioboro. Salah satu kondisi khas yang penting untuk dipertimbangkan adalah memberi toleransi lebih panjang kepada PKL Lesehan Malioboro untuk tutup lebih lama sampai pukul 23.00 WIB. "Kami meminta kepada Pemda DIY melalui Dana Keistimewaan (Danais) maupun APBD dan kepada Pemkot Yogyakarta melalui APBD agar memberikan stimulan dana hibah untuk

\* Bersambung hal 7 kol 5

ak Lanjut

1. .... ☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi



KR-Surya Adi Letmana

**BERHARAP TAK DIPERPANJANG:** Seorang pemilik los menata dagangannya di lantai dasar Pasar Beringharjo, Yogyakarta, yang masih tutup untuk pengunjung, Kamis (22/7). Para pedagang berharap, setelah 25 Juli tak ada lagi perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sehingga bisa kembali berjualan busana demi menggeliatnya perekonomian.

## Nasib

Sambungan hal 1

modal bergulir kepada PKL di Kawasan Malioboro. Penyalurannya harus melalui koperasi dan paguyuban yang menyuguhkan PKL supaya tepat sasaran dan menutupi lubang yang belum tercover pusat sehingga semua yang berhak menerima bisa terakomodir supaya suasana kondusif," paparnya.

Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto mengaku nasib PKL angkringan tidak jauh berbeda dengan PKL lainnya yang kini bertahan hidup dari berutang. Sebagian besar PKL angkringan kini menggantungkan diri dari utang yang seharusnya bisa dilunasi tahun ini tetapi tidak bisa dengan adanya PPKM Darurat yang lebih ketat.

"Jadi sama saja, dari teman-teman sangat mengharapkan bantuan modal dan bantuan hidup seperti sembako karena belum ada bantuan apa-apa selama ini. Kita sudah manut (patuh) tetapi tidak ada perhatian apa-apa. Untuk itu, harapan kami sangat besar Pemda DIY bisa memberikan bantuan dan stimulus yang mudah-mudahan bisa terealisasi dengan tepat serta cepat," imbuhnya.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, K Baskara Aji mengatakan, saat ini Pemda DIY sedang melakukan refocusing atau pergeseran anggaran baik APBD mumi maupun Dana Keistimewaan (Danais). Pergeseran anggaran untuk kegiatan rutin di masing-masing organisasi

perangkat daerah kepada penanganan Covid-19 termasuk bantuan sosial di dalamnya baru dalam tahap pembahasan. Untuk itu pihaknya sudah meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk mendata siapa saja warga dan pelaku usaha mikro yang terdampak namun belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

"Untuk Bansos saat ini masih tahap pendataan, kita kumpulkan data siapa saja yang belum mendapatkan jatah bansos. Semua ini bukan perkara mudah karena bansos ada yang diberikan rutin, ada PKH, ada sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai serta ada dari Kepolisian. Pendataan tersebut penting dilakukan agar tidak ada data ganda yang mendapatkan bantuan. Saat ini pusat tengah mendistribusikan bantuan sosial tunai untuk warga yang terdampak. Sementara di sisi lain bantuan PKH dan BPNT juga berjalan seperti biasa," papar Baskara Aji.

Sekda DIY menyatakan, selain untuk Bansos pergeseran anggaran rutin juga akan dialokasikan untuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, belanja alat pelindung diri (APD) sampai pengadaan peti jenazah untuk pemakaman pasien Covid-19. Diharapkan pergeseran anggaran bisa selesai paling lambat akhir bulan Juli atau Agustus mendatang. Sehingga Agustus bansos bisa dicairkan.

(Ira/Ria)



KR-Fira Nurfani

Suasana lengang di kawasan Malioboro, Yogyakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 07 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005